



RINGKASAN EKSEKUTIF

**DOKUMEN INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
PROVINSI DKI JAKARTA
TAHUN 2021**

**DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PROVINSI DKI JAKARTA**

DOKUMEN INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2021

Ringkasan Eksekutif (Executive Summary)

1. Pendahuluan

Provinsi DKI Jakarta sebagai ibukota Negara selalu menjadi magnet bagi masyarakat untuk datang dan tinggal. Pertambahan penduduk akibat arus urbanisasi terus meningkat dan memberikan sejumlah permasalahan lingkungan. Salah satu acuan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik adalah dengan tersedianya data dan informasi lingkungan. Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD) Provinsi DKI Jakarta dapat menjadi sumber informasi dalam menggambarkan kondisi lingkungan hidup dan informasi faktual tentang kondisi lingkungan hidup dan berbagai upaya yang telah dilakukan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Jakarta. Dokumen lingkungan ini dapat menjadi acuan pendekatan terdekat bagi para pemangku kepentingan dalam merencanakan kebijakan dan pembangunan keberlanjutan dalam menentukan prioritas pembangunan sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan lingkungan hidup.

2. Analisis Lingkungan Hidup Daerah

Penyusunan analisis lingkungan hidup dilaksanakan dengan melakukan pengumpulan dan pengolahan data, analisis data, dokumentasi kebijakan, dan penyajian informasi lingkungan hidup dengan model DPSIR. Model DPSIR adalah kerangka berpikir yang mengasumsikan hubungan kausalitas antar aspek lingkungan dan manusia sebagai pendorong (*driving force*) terhadap terjadinya tekanan (*Pressure*) sehingga mempengaruhi perubahan ekosistem (*State*) yang berdampak (*Impact*) pada manusia dan/atau lingkungan untuk selanjutnya ditanggapi (*Response*) melalui berbagai strategi untuk penanganan risiko.

2.1 Tata Guna Lahan

2.1.1 Driving Forces

Sebagai pusat pemerintahan, pertumbuhan ekonomi yang pesat di Provinsi DKI Jakarta mendorong intensitas perdagangan/jasa dan kegiatan industri memacu urbanisasi serta pertumbuhan penduduk di Provinsi DKI Jakarta. Pertumbuhan tersebut mendorong berbagai pembangunan baik pembangunan infrastruktur hingga pembangunan permukiman untuk memfasilitasi kegiatan masyarakat sekaligus pemenuhan kebutuhan tempat tinggal. Hal ini menyebabkan perubahan tata guna lahan, dimana lahan bervegetasi berpotensi tergantikan oleh lahan terbangun.

2.1.2 Pressure

Pembangunan yang massif di Provinsi DKI Jakarta sebagai upaya mengimbangi kebutuhan sosial dan ekonomi menyebabkan terjadinya alih tata guna lahan yang seringkali tidak sesuai dengan perencanaan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Lahan bervegetasi yang berupa daerah resapan air banyak beralih fungsi menjadi kawasan permukiman hingga area komersil. Tekanan lain akibat ketidakseimbangan tata guna lahan adalah terdapatnya pemanfaatan lahan ilegal oleh pihak tertentu.

2.1.3 State

Tingginya populasi masyarakat di Provinsi DKI Jakarta berimbas terhadap dominasi pemanfaatan lahan yang digunakan untuk kawasan permukiman dan area komersil. Hal ini berdampak terhadap minimnya Ruang Terbuka Hijau (RTH) serta daerah resapan air yang kemudian memiliki pengaruh terhadap kondisi fisik dan sosial berupa: peningkatan debit limpasan air hujan, penurunan kualitas dan kuantitas air tanah, kualitas tutupan lahan serta kualitas hunian.

2.1.4 Impact

Alih tata guna lahan yang tidak sesuai dengan RTRW dan Rencana Detail Tata Ruang (RTDR) memiliki dampak yang cukup signifikan terhadap masyarakat di Provinsi DKI Jakarta yang ditandai dengan penurunan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) dibandingkan nilai pada tahun 2017,

peningkatan suhu permukaan sebagai dampak *Urban Heat Island* (UHI) serta ketidaknyamanan termal. Dari segi sosial, alih guna lahan berimbas pada berbagai konflik agraria akibat aktivitas pembangunan yang seringkali tidak menghormati dan melindungi warga terdampak di dalamnya.

2.1.5 Responses

Berbagai upaya dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang salah satunya adalah pelaksanaan amanat dalam Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No.1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030 berupa optimalisasi kawasan terbuka hijau melalui intensifikasi perluasan RTH, pengembangan permukiman secara vertikal sebagai adaptasi terhadap minimnya lahan, serta konservasi suaka alam melalui reboisasi dan penanaman mangrove. Selain itu, pelaksanaan kebijakan lain seperti Rencana Tata Bangunan Lingkungan (RTBL), *Low Impact Urban Development Guideline*, serta praktik *green building* sebagai implementasi Peraturan Gubernur DKI Jakarta No.38 Tahun 2012 tentang Bangunan Gedung Hijau merupakan upaya lainnya untuk optimalisasi tata guna lahan.

2.2 Kualitas Air

2.2.1 Driving Forces

Perkembangan ekonomi yang diikuti oleh tingginya pertumbuhan penduduk menjadi faktor penyebab paling signifikan terhadap kondisi kualitas air di Provinsi DKI Jakarta. Sehingga terjadi peningkatan terhadap kebutuhan air bersih serta aktivitas masyarakat baik secara domestik ataupun perkantoran dan industri yang menghasilkan air limbah yang kemudian dialirkan ke lingkungan khususnya air permukaan.

2.2.2 Pressure

Perkembangan ekonomi dan industri menyebabkan meningkatnya kuantitas limbah sisa kegiatan yang dibuang ke lingkungan. Tingkat pelayanan pengolahan air limbah yang hanya 7,40% ditambah dengan kondisi pelayanan pengelolaan persampahan yang belum menyeluruh (hanya 83,78%) yang berpotensi terhadap adanya sampah dibuang ke

lingkungan dapat menjadi tekanan terhadap adanya pencemaran badan air di Provinsi DKI Jakarta. Keterlayanan air bersih yang belum menyeluruh yang kemudian mengakibatkan peningkatan penggunaan air tanah. Hal ini meningkatkan risiko intrusi air laut dan berimbas pada kualitas air tanah. Sebagai wilayah yang menjadi muara bagi sumber air di sekitarnya, pencemaran yang terjadi di hulu dapat menyebabkan penurunan kualitas air di Provinsi DKI Jakarta sebagai daerah hilir.

2.2.3 State

Dilakukan pemantauan terhadap 48 titik sebagai gambaran terhadap kondisi kualitas air di Provinsi DKI Jakarta yang berupa air sungai, air situ/danau/waduk, air tanah, air hujan, dan air laut. Hasil pemantauan tersebut digunakan dalam evaluasi kualitas air melalui analisis *Pollution Index* (PI) dan analisis multivariat untuk menentukan status mutu air serta pengaruh penggunaan lahan di sekitar titik pemantauan terhadap kualitas air dan signifikansi parameter tertentu. Secara garis besar status air sungai dalam kategori cemar sedang dengan BOD, COD, NO₂, NO₃, Klorin, dan Total Fosfat menjadi parameter signifikan karena dominasi aktivitas industri di sekitar titik pemantauan. Sedangkan status air situ/danau/waduk dan air laut didominasi kategori baik hingga cemar ringan dengan Minyak-Lemak sebagai parameter signifikan karena pengaruh kegiatan domestik dan industri. Untuk kualitas air tanah lebih dari 50%-nya memenuhi standar baku mutu.

2.2.4 Impact

Semakin banyaknya aktivitas ekonomi dan industri yang menghasilkan air limbah dengan kondisi pengolahan air limbah tidak memadai dapat berdampak terhadap penurunan kualitas sumber air bersih. Hal ini diperparah dengan abstraksi air tanah berlebih, yang dapat menyebabkan penurunan muka air tanah yang berimbas pada berkurangnya pasokan air tanah serta potensi intrusi air laut. Selain itu, terdapat penambahan kasus dan penderita *waterborne disease* yang

merupakan penyakit karena adanya pencemaran pada air yang dikonsumsi manusia sebagai imbas penurunan kualitas dan ketersediaan air bersih.

2.2.5 Responses

Untuk menanggulangi permasalahan kualitas air karena kurang memadainya akses sanitasi layak, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengembangkan *Jakarta Sewerage System* (JSS) untuk meningkatkan pelayanan dan efisiensi pengolahan air limbah, dimana akan terdapat 15 zona pelayanan dengan target cakupan pelayanan hingga 80% dan penurunan BOD di badan air hingga 84%. Tidak hanya itu, terdapat pembangunan Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPAL-D) skala permukiman untuk peningkatan pelayanan pengolahan air limbah yang merupakan hasil kolaborasi antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan pihak ketiga. Selain itu, dilakukan berbagai upaya lainnya seperti perbaikan dan perluasan jaringan perpipaan air minum hingga pengetatan Izin Pembuangan Limbah Cair (IPLC) bagi industri.

2.3 Kualitas Udara

2.3.1 Driving Forces

Seiring dengan berkembangnya perekonomian di Provinsi DKI Jakarta, terjadi peningkatan aktivitas industri beserta berbagai kegiatan masyarakat yang dapat menghasilkan polusi udara. Dengan statusnya sebagai pusat perkotaan dalam Kawasan Metropolitan Jabodetabek, DKI Jakarta selalu dipadati dengan mobilitas transportasi darat dari berbagai kota satelit di sekitarnya. Hal tersebut dapat meningkatkan emisi gas kendaraan bermotor dan berdampak terhadap penurunan kualitas udara di wilayah DKI Jakarta.

2.3.2 Pressure

Pertumbuhan penggunaan kendaraan bermotor sebagai pemenuhan kebutuhan mobilitas warga DKI Jakarta sangat berpengaruh terhadap terjadinya pencemaran udara sepanjang tahun 2020, dimana sekitar 75% polusi bersumber dari sektor transportasi darat. Tidak hanya pertumbuhan

kendaraan, peningkatan produksi energi listrik yang sebagian besar menggunakan minyak bumi untuk pemenuhan aktivitas industri hingga domestik tentunya menambah beban emisi DKI Jakarta. Hal ini diperparah dengan berkurangnya lahan hijau (cth. Hutan, RTH, dll.) yang berperan dalam reduksi polusi udara khususnya karbon dioksida akibat berbagai pembangunan yang tidak sesuai perencanaan.

2.3.3 State

Melalui pemantauan kualitas udara di 24 lokasi yang tersebar di seluruh Provinsi DKI Jakarta, dilakukan analisis multivariat yang memberikan kesimpulan bahwa tidak hanya terjadi emisi dari CO₂, PM₁₀, PM_{2,5}, BC, NMVOCs, tetapi terdapat signifikansi pencemar Oksida Nitrogen terkhusus pada lokasi yang didominasi kegiatan transportasi, perkantoran, dan permukiman serta pencemar Sulfur Oksida pada lokasi yang didominasi kegiatan penghasil emisi tidak bergerak seperti industri hingga pembangkit listrik. Berbagai kondisi tersebut menyebabkan menurunnya nilai Indeks Kualitas Udara (IKU) dibandingkan tahun 2020.

2.3.4 Impact

Penurunan kualitas udara perkotaan berdampak signifikan terhadap kesehatan yang salah satunya berpotensi menimbulkan Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) serta iritasi terhadap kelompok masyarakat yang lebih sensitif. Belum maksimalnya upaya pengendalian polusi udara berdampak terhadap tingginya kandungan Sulfur Dioksida dan Nitrogen Oksida di atmosfer yang dapat menimbulkan hujan asam, dimana pada Juni 2020 terjadi hujan dengan nilai pH di bawah 5 yang bahkan lebih rendah dibandingkan kondisi normal. Selain itu, polusi yang semakin tinggi tanpa diimbangi pertumbuhan lahan hijau dapat meningkatkan suhu udara perkotaan yang dikenal dengan fenomena *Urban Heat Island* (UHI).

2.3.5 Responses

Pelaksanaan amanat dari Peraturan Daerah No.2 Tahun 2005 serta Instruksi Gubernur DKI Jakarta No. 66 Tahun 2019 tentang Pengendalian Kualitas Udara berupa penghijauan Gedung sekolah dan Gedung

pemerintah, pengembangan integrasi sarana transportasi umum seperti *Transit Oriented Development* (TOD), pengetatan uji emisi kendaraan, hingga kewajiban instalasi solar panel sebagai syarat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk mengurangi konsumsi listrik dari pembangkit listrik tenaga bahan bakar minyak dilakukan sebagai upaya pengendalian pencemaran udara. Selain itu, pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) atau *Car Free Day* (CFD) yang mengikutsertakan partisipasi masyarakat menjadi upaya yang cukup signifikan terhadap penurunan emisi di Provinsi DKI Jakarta.

2.4 Risiko Bencana

2.4.1 Driving Forces

Risiko bencana di Provinsi Jakarta disebabkan oleh jumlah penduduk yang tinggi mengingat Jakarta juga sebagai Ibu Kota negara. Faktor industrialisasi di DKI Jakarta yang relatif baik dan stabil meningkatkan angka pertumbuhan ekonomi dibuktikan dengan nilai PDRB diatas nilai nasional mengundang sebagian orang untuk melakukan urbanisasi sehingga semakin meningkatkan jumlah penduduk. Peningkatan penduduk ini kemudian mendorong kebutuhan pemenuhan seperti pelayanan air minum, perumahan, dan kesehatan.

2.4.2 Pressure

DKI Jakarta menjadi tumpuan dan harapan banyak orang untuk mendapatkan penghidupan yang layak sehingga memberikan tekanan terhadap kebutuhan penghidupan di atas lahan yang terbatas. Hal ini menimbulkan sejumlah konsekuensi peralihan penggunaan lahan untuk memenuhi kebutuhan akan permukiman serta fasilitas dasar perkotaan, akses terhadap air bersih, pengelolaan persampahan yang pada akhirnya dengan segala polemik yang terjadi memberikan beban yang tinggi kepada lingkungan. Curah hujan di wilayah DKI Jakarta tercatat tinggi oleh BMKG, sehingga dengan kondisi faktual drainase yang terbatas dan penyempitan

sungai, semakin meningkatkan tekanan pada kejadian kebencanaan di wilayah Provinsi DKI Jakarta.

2.4.3 State

Penurunan tanah di DKI Jakarta termasuk yang tinggi di dunia, rerata laju penurunan adalah 6 cm per tahun dengan penurunan tertinggi berada di wilayah utara Jakarta. Sepanjang tahun 2020, terdapat terdapat 215 lokasi banjir. Curah hujan yang ekstrem diawal tahun juga memberikan catatan curah hujan tertinggi dan menggenangkan sebagian wilayah DKI Jakarta di lima wilayah administrasi. Selain banjir, bencana yang terjadi dalam frekuensi besar adalah kebakaran. Pada tahun 2020, terjadi kebakaran pada 542 lokasi. Bencana alam lainnya yang terjadi adalah bencana longsor di 17 lokasi dan angin kencang di 2 lokasi. Pada bencana non-alam, penyebaran *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19) ditetapkan sebagai bencana nasional karena dampak yang dirasakan secara masif, khususnya DKI Jakarta dengan kondisi aktivitas yang cukup tinggi.

2.4.4 Impact

Kejadian bencana di DKI Jakarta memberikan sejumlah dampak. Penurunan tanah yang kontinu diikuti dengan penurunan muka air sehingga menyebabkan terjadinya intrusi air laut pada wilayah utara Jakarta dan berakhir pada kelangkaan air bersih. Pada kejadian bencana banjir, tercatat total area tergenang pada tahun 2020 adalah 29.382,03 Ha dan jumlah pengungsi tercatat adalah 77.672 jiwa. Pada kejadian bencana kebakaran, total kerugian secara finansial tercatat Rp 233.616.900.000. Dampak lainnya juga dirasakan pada kejadian longsor dengan nilai kerugiannya adalah Rp 130.000.000 dan angin kencang Rp 163.900.000. Selain itu, jumlah konfirmasi kumulatif positif COVID-19 sampai dengan akhir tahun 2020 adalah 183.735 jiwa.

2.4.5 Responses

Upaya penanggulangan kejadian bencana DKI Jakarta merujuk pada Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) yang disusun oleh BPBD DKI Jakarta per lima tahun. Perencanaan penanggulangan DKI Jakarta termasuk

dalam prioritas rencana Kota Jakarta sebagai *resilient city* pada pilar 'Jakarta Siap' berupaya mewujudkan usulan kegiatan dalam penanggulangan bencana seperti banjir, kebakaran, dan eksploitasi air tanah. Telah dilakukan upaya fisik perbaikan dalam infrastruktur pengendali banjir dan perbaikan drainase, pengerukan dan normalisasi sungai, menetapkan kawasan dan jalur evakuasi bencana. Pada kebakaran, upaya yang dilakukan merujuk pada Rencana Induk Proteksi Kebakaran (RIPSK). Sedangkan pada kebencanaan lainnya, Pemrov DKI Jakarta memberikan dana bantuan dan perbaikan fasilitas infrastruktur yang rusak.

2.5 Perkotaan

2.5.1 Driving Forces

DKI Jakarta adalah provinsi dengan penduduk terpadat di Indonesia. Pada tahun 2020, tercatat kepadatannya mencapai 16 ribu jiwa/km². Pertumbuhan penduduk juga sejalan linear dengan sektor-sektor lain seperti industri untuk konsumsi barang dan jasa, transportasi untuk menunjang mobilitas penduduk serta konstruksi dalam rangka memenuhi permintaan tempat tinggal atau rumah hunian.

2.5.2 Pressure

Pressure yang terjadi akibat pertumbuhan penduduk adalah meningkatnya aktivitas masyarakat perkotaan. Banyak faktor yang menyebabkan pressure pada permasalahan perkotaan seperti industri, limbah domestik, pencemaran udara, hingga permasalahan sosial. Selain itu, peningkatan tingkat pertumbuhan penduduk karena dapat mengakibatkan permasalahan lain seperti permasalahan pada permukiman, lapangan kerja, dan ketidakteraturan permukiman.

2.5.3 State

Semakin tingginya aktivitas perkotaan dan kegiatan masyarakat mengakibatkan tingginya timbulan sampah yang dihasilkan. Sampai tahun 2020 sampah di Provinsi DKI Jakarta masih dibuang ke TPST Bantar Gebang. Kesenjangan sosial dan ekonomi, pengangguran dan kemiskinan

masih menjadi masalah perkotaan di DKI Jakarta. Menurut BPS Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2020, penduduk miskin di DKI Jakarta bertambah 118,6 ribu orang menjadi 480,86 ribu orang pada Maret 2020. Pertumbuhan penduduk yang sangat pesat yang tidak dibarengi dengan pemerataan pertumbuhan ekonomi, mendorong bermunculannya pemukiman ilegal dan kumuh. Pertumbuhan penduduk juga mengakibatkan peningkatan volume kendaraan yang mengakibatkan kemacetan.

2.5.4 Impact

Dampak dari banyaknya timbulan sampah dari DKI Jakarta adalah TPST Bantargebang akan penuh lama waktu dekat lantaran menerima 7.500 ton sampah dari Jakarta per harinya. Penumpukan sampah dan permasalahan sanitasi di DKI Jakarta juga dapat mengakibatkan permasalahan baru seperti timbulnya vektor penyakit. Selain permasalahan mengenai sanitasi, dampak dari aktivitas perkotaan yang juga dapat dirasakan oleh masyarakat adalah perubahan suhu udara perkotaan akibat peningkatan emisi GRK. Permasalahan sosial juga dapat mengakibatkan kejadian negatif pada perkotaan seperti penurunan estetika perkotaan dan konflik kriminalitas serta meningkatnya tingkat kemiskinan.

2.5.5 Responses

Response yang dapat dilakukan adalah melakukan pengembangan sistem pengelolaan persampahan berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No 21 Tahun 2006, melaksanakan peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah DKI tentang permasalahan persampahan, melakukan pembangunan masterplan pengelolaan sampah dan pembangunan ITF, melanjutkan pembangunan JSS, melaksanakan program bantuan sosial, penataan kampung, pelaksanaan gedung hijau, integrasi antarmoda, dan cepat tanggap dalam penanganan bencana.

2.6 Tata Kelola

2.6.1 Driving Forces

Tata kelola lingkungan hidup di Jakarta sangat penting, sebab kehidupan di DKI Jakarta memiliki heterogenitas yang tinggi. Sebagai pusat Ibu Kota, terjadi proses urbanisasi dimana banyak penduduk dengan keragaman budaya tinggal di DKI Jakarta. Tingginya angka jumlah penduduk memicu kebutuhan-kebutuhan dalam melengkapi kehidupan manusia, diantaranya adalah kebutuhan untuk perumahan dan kebutuhan fasilitas umum. Selain itu, tingginya jumlah penduduk juga mendorong segala kegiatan perekonomian diberbagai sektor seperti perdagangan/jasa, transportasi, pembangunan konstruksi, dan kegiatan industri.

2.6.2 Pressure

Kegiatan ekonomi yang meningkat membuat sejumlah pelaku usaha dan/atau industri untuk melakukan ekspansi atau pembangunan fasilitas. Peningkatan jumlah industri di berbagai sektor memberikan sejumlah permasalahan lingkungan baru, diantaranya adalah peningkatan jumlah timbulan limbah industri dan variasi sumber pencemar. Limbah industri di berbagai sektor diantaranya bersifat berbahaya dan memberikan pencemaran kepada lingkungan.

2.6.3 State

Pada tahun 2020, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta menerbitkan 1.802 dokumen izin lingkungan. Disisi lain, peningkatan jumlah pelaku usaha tercatat pada tahun 2020 terdapat 246 perusahaan baru yang memiliki izin mengelola limbah B3. Pada isu permasalahan lingkungan, diketahui terdapat 1989 pengaduan pelaporan permasalahan terkait dengan isu lingkungan. Untuk pengawasan, Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta didukung oleh personil dengan latar belakang pendidikan hingga Doktor (S3). Meskipun demikian jumlah yang ada kurang mencukupi sehingga pada pencatatan tahun 2020, dari 1734 daftar nama perusahaan, tercatat hanya terdapat 16% perusahaan yang berdasarkan pengawasan izin lingkungan dinilai 'taat'.

2.6.4 Impact

Dampak yang kemudian muncul sebagai akibat dari tata kelola yang buruk adalah penurunan kualitas. Didapatkan nilai IKLH Provinsi DKI Jakarta adalah 51,94 atau termasuk dalam kategori 'sedang'. Penurunan terjadi pada aspek air dan udara di sejumlah parameter. Tata kelola yang tidak baik, dapat mempengaruhi kualitas lingkungan yang pada akhirnya dapat berdampak pada biodiversitas flora dan fauna di DKI Jakarta. Untuk mendukung tata kelola lingkungan yang keberlanjutan dapat tercapai melalui koordinasi antara pemerintah dan masyarakat. Pada tahun 2020 diketahui terdapat 13 kegiatan/program yang diinisiasi masyarakat.

2.6.5 Responses

Respon yang telah diberikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam upaya peningkatan mutu pengelolaan lingkungan hidup adalah dengan melakukan koordinasi antar lembaga pengelola lingkungan hidup dan mendorong keterlibatan masyarakat. Dalam perencanaan, telah disusun dan dipertimbangkan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Penganggaran (APBD) juga merupakan salah satu bentuk konkret dalam merespons isu lingkungan hidup. Selain itu, pemerintah mengeluarkan 10 produk hukum berupa Peraturan Gubernur dan Keputusan Gubernur terkait dengan isu lingkungan yang terjadi.

3. Analisis Lingkungan Hidup Daerah

Penetapan isu prioritas dilakukan dengan metode FGD, karena situasi pandemi COVID-19 yang terjadi selama proses penyusunan dokumen. Kegiatan partisipatif dilakukan melalui jajak pendapat secara online yang dihadiri total 69 responden berasal dari berlatar belakang instansi pemerintahan, akademisi, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), serta praktisi individual. Penilaian pembobotan dilakukan dengan metode perbandingan berpasangan (*pairwise comparison*) dan pemeringkatan isu prioritas dilakukan metode Proses Hirarki Analisis (*Analytical Hierarchy Process*) sehingga didapatkan lima isu prioritas lingkungan hidup.

3.1 Bencana Banjir

Bencana banjir menjadi isu lingkungan hidup prioritas pertama dari 16 kelompok isu lingkungan hidup. Pemicu banjir yang paling mendominasi adalah curah hujan yang tinggi. Pada Januari 2020, DKI Jakarta mengalami curah hujan terbesar sepanjang sejarah pencatatan. Per 1 Januari 2020, sebanyak 157 kelurahan (60,2%). Meskipun demikian, fenomena banjir cepat ditanggapi dan surut secara signifikan dalam empat hari. Kejadian banjir rob juga terjadi karena kenaikan muka air laut dan faktor tanggul jebol. Upaya pengendalian banjir yang masif telah dilakukan dengan kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Pemerintah Pusat melalui Bendungan Kering (*Dry Dam*) Ciawi-Sukamahi yang berlokasi di Hulu Sungai Ciliwung, Kabupaten Bogor.

3.2 Kerawanan Air Bersih

Perkembangan aktivitas masyarakat kegiatan industri, dan penduduk seiring dengan meningkatnya ekonomi Provinsi DKI Jakarta dapat meningkatkan jumlah air limbah yang dihasilkan. Dengan kondisi tidak terpenuhinya pelayanan pengelolaan air limbah, potensi pembuangan air limbah secara langsung ke badan air tanpa pengolahan dapat menurunkan kualitas badan air.

Melalui status mutu air diketahui sekitar 50% titik pemantauan air permukaan yang terdiri atas 9 titik pemantauan air sungai dan 13 titik pemantauan air danau/waduk/situ/embung termasuk ke dalam kategori cemar sedang. Dengan cakupan pelayanan air bersih yang belum maksimal serta kondisi kualitas air yang kurang baik menyebabkan taraf keamanan air Provinsi DKI Jakarta termasuk kategori *low-medium water security* atau rendah hingga menengah.

3.3 Pengelolaan Sampah Belum Optimal

Peningkatan ekonomi, pertumbuhan populasi dan aktivitasnya di berpotensi meningkatkan timbulan sampah, dimana DKI Jakarta menghasilkan sampah hingga 8.369 ton/hari pada tahun 2020. Dengan banyaknya timbulan sampah yang dihasilkan di DKI Jakarta, kondisi pengelolaan sampah di sumbernya yang belum maksimal menjadi

permasalahan tersendiri karena sebagian besarnya dibuang menuju TPST Bantargebang yang kondisinya tidak ideal untuk terus menerus menampung sampah serta berpotensi terjadinya penumpukan yang berdampak buruk terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat. Selain itu, tantangan muncul dari tidak berimbangnya jumlah incinerator untuk mengolah timbulan limbah medis dan infeksius yang terus meningkat selama pandemi.

3.4 Pencemaran Udara

Berkembangnya perkotaan karena pertumbuhan ekonomi serta pembangunan yang pesat dapat meningkatkan intensitas aktivitas masyarakat di dalamnya yang kemudian berpotensi menimbulkan polusi udara yang tinggi. Melalui inventarisasi di Provinsi DKI Jakarta, didapatkan kuantitas emisi dari setiap parameter pengukuran yaitu: 1) 4.257 ton SO₂, 2) 106.068 ton NO_x, 3) 298.170 ton CO, 4) 8.817 ton PM₁₀, 7.842 ton PM_{2,5}, 5) 6.007 ton *Black Carbon*, dan 6) 201.927 ton NMVOCs. Dimana sumber emisi sebagian besar berasal dari sector transportasi dan sector industry. Hal ini menyebabkan penurunan nilai Indeks Kualitas Udara (IKU) hingga 1,28 poin dari tahun sebelumnya yang menandakan terdapat peningkatan polusi udara di Provinsi DKI Jakarta.

3.5 Minim Daerah Resapan Air dan Ruang Terbuka Hijau

Berbagai pembangunan yang dilakukan untuk mengimbangi pertumbuhan ekonomi, industri, serta populasi di Provinsi DKI Jakarta mengakibatkan berbagai perubahan tata guna lahan yang seringkali tidak sesuai dengan kebijakan RTRW dan RDTR. Hingga saat ini, hanya terdapat sekitar 9.602 Ha atau 14,51% lahan RTH di Provinsi DKI Jakarta yang mengindikasikan belum tercapainya target RTH sebesar 30% sesuai dengan amanat pada Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No.1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030.

Selain itu, pembangunan wilayah komersil hingga permukiman yang meningkatkan luasan tutupan lahan kedap air yang mencapai 64-92% di Provinsi DKI Jakarta menyebabkan terbatasnya daerah resapan air. Melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi DKI

Jakarta 2017-2022, Provinsi DKI Jakarta ditargetkan memiliki 1,8 juta titik sumur. Namun hingga April 2021 baru terbangun 3.311 titik sumur, sehingga dapat dikatakan wilayah DKI Jakarta minim daerah resapan air.

4. Inovasi Daerah dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup

Berbagai inovasi telah diupayakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menjawab permasalahan isu lingkungan hidup. Pada pembahasan tahun ini, inovasi-inovasi yang dilakukan pada tahun 2020 terbagi ke dalam dua kategori sebagai berikut:

A. Inovasi dalam Pengelolaan Limbah dan Emisi

1. Sistem Pengelolaan Limbah Elektronik (e-waste)
2. Pengelolaan Sampah Lingkup Rukun Warga (RW)
3. Penggunaan Kantong Belanja Ramah Lingkungan pada Pusat Perbelanjaan, Toko Swalayan dan Pasar Rakyat
4. Pengelolaan Sampah Kawasan Mandiri
5. Uji Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor
6. *Landfill Mining*

B. Inovasi dalam Penerapan Teknologi Informasi

1. Aplikasi e-Bank Sampah Berbasis Android (Dinas Lingkungan Hidup)
2. E-Monitoring Timbangan TPST Bantargebang
3. Pengelolaan Pencahayaan Kota Berbasis Smart Lighting di Provinsi DKI Jakarta (Dinas Bina Marga)
4. Sistem Informasi Geografis Pendataan Ruang Terbuka Hijau (DCKTRP)
5. Jakarta Kini (JakISPU -JakPantau -JakLapor)
6. Website Sistem Pantau Banjir

Inovasi-inovasi yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama dengan partisipasi penduduk adalah upaya untuk mencapai pemerintahan yang berkelanjutan (*Continuous Improvement*) dan berkesinambungan.